



Sulit Awasi Distribusi di Jalur Tikus

■ Pemda DIY Kekurangan Tim Pengawas Hewan Kurban

YOGYA, TRIBUN - Pemda DIY mengu-
 ngku menghadapi kendala untuk memantau distribusi hewan kurban dari luar daerah. Utamanya, jalur-jalur alternatif atau "jalur tikus" lantaran keterbatasan pengawas.

Persoalan keterbatasan SDM ini membuat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) tak mampu memantau kendaraan pengangkut hewan kurban yang masuk DIY.

Kepala DPKP DIY, Sugeng Purwanto, mengatakan, selama ini pengawasan lalu lintas hewan kurban dilakukan demi mencegah penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) dan *lumpy skin disease* (LSD) alias penyakit kulit berbenjol. Dari segi sarana dan prasarana, DPKP DIY sudah menyiapkan tujuh pos lalu lintas ternak (PLLT) di setiap perbatasan DIY.

Pos pengawasan itu untuk memastikan hewan ternak dari luar DIY masuk maupun keluar dalam kondisi sehat. Pengecekan meliputi kepemilikan surat legalitas serta surat keterangan kesehatan hewan (SKKH), serta pemeriksaan fisik hewan.

"Tapi pemeriksaan fisik hanya sekilas karena tenaga kami terbatas. Di masing-masing pos hanya ada dua petugas yang berjaga," kata Sugeng, Rabu (14/6).

Namun demikian, Sugeng menjamin pengawasan hewan ternak dari luar daerah dilakukan secara berlapis. Mereka yang lolos di pos perbatasan, dipastikan bakal terjarang pemeriksaan sesampainya di pasar atau tempat penjualan hewan kurban.

"Kalau dari dari barat biasanya dari Kebumen, Purworejo, Banjarnegara. Dari arah utara paling dekat dari Magelang, Boyolali," terangnya.

Khusus wilayah DIY, menurut Sugeng, status penyebaran kasus PMK dan LSD di mulai landai atau ter-

kendali untuk sekarang ini. Ia tak menyangkal ada hewan ternak yang terjangkiti kedua penyakit itu, namun untuk persentase yang sangat rendah.

"Saya yakin masih ada yang terjangkit PMK dan LSD, tapi pada porsi dan persentase yang sangat rendah," imbuh dia.

Sugeng menjamin hewan ternak di wilayahnya aman dijadikan kurban menimbang serangkaian upaya yang telah dilakukan Pemda DIY. Selain pemeriksaan hewan ternak, upaya lain yaitu vaksinasi yang terus digencarkan.

Dari total populasi sapi di DIY sebanyak 900 ribu ekor, vaksinasi PMK telah menjangkau 233.500 ekor. Sementara vaksinasi LSD 3.778 ekor. Jangkauan vaksinasi LSD lebih sedikit karena penularannya tidak secepat PMK.

Sugeng turut memastikan persediaan hewan ternak khususnya sapi dan kambing di DIY. Bahkan, menurutnya ketersediaan hewan kurban tahun ini lebih dari cukup.

Berdasarkan data ketersediaan hewan ternak DPKP DIY, populasi sapi potong di DIY tercatat mencapai 31 ribu ekor, kambing 40 ribu ekor, dan domba mencapai 17.999 ekor. Sedangkan perkiraan kebutuhan untuk kurban: untuk sapi mencapai 25 ribu ekor, kambing 22.800 ekor, dan domba 24.800 ekor.

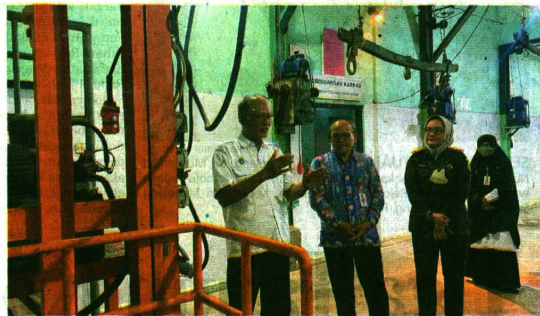
Masih aman

Sementara itu, Pemkot Yogya mulai mengaktifkan upaya pengawasan kesehatan hewan ternak jelang Iduladha pada akhir Juni 2023 mendatang. Namun, sampai Rabu (14/6), eksekutif belum menemukan hewan yang masuk wilayahnya dalam kondisi terpapar deretan penyakit menular seperti LSD dan PMK.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

KENDALA SDM

- Pemda DIY terkendala pengawas untuk memantau distribusi hewan kurban dari luar daerah.
- Pengawasan yang kurang utamanya, jalur-jalur alternatif atau "jalur tikus".
- Pengawasan ini untuk mencegah penularan PMK dan lumpy skin disease (LSD).
- Hingga kini, belum ada temuan hewan kurban yang terinfeksi penyakit.



TINJAU KESIAPAN - Jajaran TPID dan Pemkot Yogya meninjau kesiapan RPH Giwangan jelang Iduladha, Rabu (14/6). Hingga kini, belum ada temuan hewan kurban yang terinfeksi PMK dan LSD.

Kota Yogyakarta, Suyana, mengatakan, hingga sejauh ini, pihaknya telah memeriksa 499 kambing dan domba yang dipasarkan lewat pasar tiban milik masyarakat. Dari jumlah itu, ia pun memastikan, semuanya dalam kondisi sehat dan layak diperjualbelikan, untuk mencukupi permintaan hewan kurban umat muslim di Kota Pelajar.

"Sudah ada 499 ekor domba dan kambing yang kami periksa, dari tujuh lokasi pasar tiban di Kota Yogya. Semuanya sehat," urainya.

Sesuai fenomena tahun-tahun sebelumnya, Kota Yogya sangat mengandalkan pasokan ternak dari luar daerah guna memenuhi permintaan hewan kurban masyarakat. Akan tetapi, ia menegaskan, hewan yang diperjualbelikan di Kota Yogya selama Iduladha wajib memiliki SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan), sebagai jaminan bebas dari PMK dan LSD.

"Kami berharap, teman-teman pemasok dari luar daerah itu care terhadap SKKH, ya, karena hewannya bakal dilepas ke daerah lain," ungkapnya. **(hda/aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005